

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN YAYASAN AZ-ZAHRA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI KOTA PEKALONGAN



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I
pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh :
LUQMAN ILHAM PRIHADI
L100 140 145**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN YAYASAN AZ-ZAHRA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI KOTA PEKALONGAN**

PUBLIKASI ILMIAH

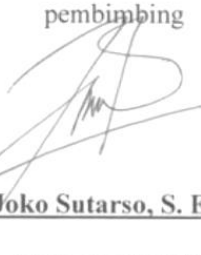
oleh:

LUQMAN ILHAM PRIHADI

L100140145

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
pembimbing



Drs. Joko Sutarso, S. E., M. Si

NIK. 132058076

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN YAYASAN AZ-ZAHRA DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN DI KOTA PEKALONGAN

OLEH

LUQMAN ILHAM PRIHADI

L100140145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Komunikasi dan Informatika

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 29 Juli 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Joko Sutarso, S.E., M.Si (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Ratri Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Agus Triyono, M.Si (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Sudrajat, S. T. M.Sc. Ph. D

NIDN. 881

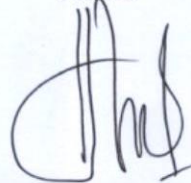
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juli 2020

Penulis



LUQMAN ILHAM PRIHADI

L100140145

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN YAYASAN AZ-ZAHRA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI KOTA PEKALONGAN

Abstrak

Komunikasi Sosial Pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang layak dan masyarakat yang mandiri. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal yang dapat diterima oleh masyarakat supaya tujuan dari komunikasi sosial pembangunan ini dapat terwujud serta menggunakan teori *Stimulus-Organism-Response* untuk mengetahui strategi komunikasi pembangunan yang digunakan, dengan metode *purposive sampling* memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara sehingga mencakup seluruh akses yang peneliti harapkan. Melalui pelatihan kewirausahaan, yayasan Az-Zahra mampu menciptakan karakter perempuan pesisir yang mampu mengembangkan kemampuan dalam sektor ekonomi yang mungkin masih tertinggal jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, yayasan Az-Zahra melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan pesisir sehingga mereka dapat melakukan kegiatan yang positif dalam kesehariannya. Dengan melakukan kegiatan ini, yayasan Az-Zahra sudah berhasil mencapai tujuan dari komunikasi sosial pembangunan yang mereka rancang untuk masyarakat pesisir di kota Pekalongan dan membebaskan masyarakat tersebut dari kegiatan yang kurang bermanfaat dan juga melakukan pemantauan setiap seminggu sekali untuk pendampingan atau *follow up* dari kegiatan pemberdayaan yang mereka lakukan selama 20 tahun lebih.

Kata Kunci : Komunikasi Sosial Pembangunan, Komunikasi Interpersonal, Perempuan Pesisir

Abstract

Social Communication Development is one branch of communication that aims to create a decent society and an independent society. The approaches taken use interpersonal communication approaches that can be accepted by the community so that the objectives of social development communication can be realized and using the stimulus-organism-response theory to find out the development communication strategies used, with the judgment sampling method makes it easy for researchers to conduct interviews so that they cover all the access that researchers expect. Through entrepreneurship training, the Az-Zahra foundation is able to create the character of coastal women who are able to develop capabilities in the economic sector that may still be far from enough. Therefore, the Az-Zahra foundation is empowering the community by providing entrepreneurship training to coastal women so that they can carry out positive activities in their daily lives. By carrying out this activity, the Az-Zahra foundation has succeeded in achieving the objectives of the development social communication that they have designed for coastal communities in the city of Pekalongan and freeing the community from less useful activities and also monitoring

once a week for assistance or follow-up of empowerment activities they have done for more than 20 years

Keywords: Social Communication Development, Interpersonal Communication, Coastal Women

1. PENDAHULUAN

Secara umum disepakati bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia yang meliputi perbaikan tingkat hidup, kesehatan, pendidikan, serta keadilan. Pembangunan ekonomi sering diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan didalamnya terkandung tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negar. Kegiatan tersebut dalam jangka panjang akan memiliki dampak pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, atau Iptek. Pembangunan ekonomi sering menyoroti 3 elemen penting, diantaranya: (1) pembangunan sebagai suatu proses diartikan bahwa pembangunan adalah tahapan yang perlu dijalani oleh masyarakat untuk menuju pada kondisi adil, makmur, dan sejahtera; (2) pembangunan sebagai suatu ikhtiar untuk mampu meningkatkan pendapatan per kapita; (3) Pendapatan per Kapita berlangsung dalam jangka panjang artinya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Karena tumpuan dari proses perubahan tersebut adalah bidang ekonomi, maka definisi dari pembangunan sering terfokus kepada definisi pembangunan ekonomi, yaitu: (1) pemenuhan kesejahteraan individu yang sering diukur dalam bentuk pendapatan per kapita, (2) pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum, dan (3) pemenuhan akan adanya harga diri (*self-esteem dan self-respect*), (Goulet, 1971; Pearce and Warford, 1993). Tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia selain untuk meningkatkan pendapatan per kapita juga bisa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, serta meminimalisir pengangguran.

Pembangunan (*development*) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial secara komprehensif. Sistem tersebut dapat berupa sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, serta budaya (Alexander 1994). Portes (1976) juga memberikan penjelasan bahwa pembangunan diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Proses pembangunan adalah

suatu proses perubahan yang direncanakan guna merekonstruksi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Durkheim pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dalam dimensi kuantitatif dan kualitatif, yaitu adanya perubahan orientasi masyarakat dari berfikir tradisional menjadi modern. Karena itu akan terjadi perubahan tata nilai masyarakat dari yang berbasiskan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Indikator yang bisa dilihat adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial ekonomi modern.

Paradigma modernisasi didasari oleh asumsi bahwa masalah kemiskinan dan keterbelakangan warga negara berkembang disebabkan oleh kultur dan struktur internal masyarakat negara berkembang itu sendiri sehingga untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan perubahan harus dilakukan pada kultur dan struktur masyarakat tersebut. Perubahan dimaksud diskenariokan berlangsung dalam bentuk transformasi kultural dan struktural dari ciri masyarakat tradisional menuju ciri masyarakat modern. Proses demikian disebut modernisasi. Artinya, jawaban yang diberikan oleh paradigma modernisasi terhadap cara bagaimana pembangunan dijalankan ialah dengan melalui proses modernisasi.

Negara Indonesia terkenal memiliki potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki 17.508 gugusan pulau-pulau. Potensi sumberdaya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan berbagai macam jasa lingkungan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar didunia, dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan lautan yaitu 6,32 juta km² ditambah jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 Km² (Pudjiastuti, 2016). Indonesia secara geografis juga terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Letak geografis Indonesia semakin strategis karena berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan perdagangan dan politik dunia. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus serta ketergantungan yang tinggi terhadap kelautan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya perairan memiliki banyak selat-selat. Salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat yang terkenal di dunia internasional yaitu Selat Malaka. Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatera (Indonesia). Selat Malaka mempunyai peranan penting bagi dunia internasional karena letaknya strategis.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut, yang lebih penting dari sejumlah persyaratan yang tersedia dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivan Rizali adalah adanya pemahaman secara eksternal terutama internal mengenai pranata-pranata tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktikkan masyarakat setempat. Pranata tersebut penting dicermati khususnya berkaitan dengan organisasi dan peraturan pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Karena telah sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa, bukanlah bermuara pada persoalan ketersediaan sarana fisik, teknis, dan uang. Banyak contoh-contoh bagaimana sarana fisik dibangun dan bantuan keuangan diberikan kepada warga desa tetapi akhirnya sia-sia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam manajemen bantuan langsung.

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka (*open access*).

Kondisi tersebut berbeda dengan sifat kepemilikan bersama (*common property*) seperti yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon dengan kelembagaan Sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-Awig dan Sangesa, Talaud dengan kelembagaan Maneeh yang pengelolaan sumberdayanya diatur secara komunal. Dengan karakteristik *open access* tersebut, kepemilikan tidak diatur, setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan

sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya.

Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia khususnya pulau jawa, merupakan pemasok terbesar dalam hasil kelautan yang memang pada dasarnya hampir disebagian wilayah pulau jawa bermatapencaharian nelayan, salah satunya adalah pekalongan. Selain terkenal dengan batik, pekalongan juga turut andil dalam sumbangsih hasil kelautan di pulau jawa ini. Sama halnya dengan riset sebelumnya, masyarakat pesisir di pekalongan sangat rawan sekali untuk merasakan kemiskinan dan sebagian istri-istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan dengan suka rela menjual diri untuk menambah penghasilan.

Dalam mencegah dan menanggulangi kasus tersebut, sebuah yayasan yang berasaskan Islam mencoba untuk melakukan pemberdayaan sekaligus melakukan dakwah dimasyarakat pesisir pekalongan. Program ini sudah dijalankan sejak tahun '90an dan sudah meminimalisir hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat pesisir tersebut dengan mengembangkan potensi dari masyarakat itu sendiri, sehingga menjadikan masyarakat pesisir lebih terbuka pemikirannya.

Dalam penelitian Susalman Moita (2017) terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian, hal ini yang menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti supaya dapat memberikan kontribusi dalam hal penelitian selanjutnya. Ada beberapa yang kemudian menjadi persamaan dalam penelitian Salsalman Moita yang kemudian meneliti sebuah masyarakat pesisir di Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Konawe, adapun persamaan dengan penelitian ini masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dari pengelolaan sumber daya pesisir. Namun dalam penelitian Salsalman, masyarakat disana mayoritas pekerjaannya hanya sebagai nelayan saja. Persamaan lain dalam penelitian tersebut faktor ekonomi dan perkembangan IPTEK yang masih lambat

menjadi permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, pasalnya dalam hal ini masih ada ketidakpercayaan atas kinerja yang sudah mereka kerjakan sehingga hasil yang mereka dapatkan hanya menjadi konsumsi pribadi saja. Beberapa perbedaan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan untuk merubah pola pikir dari masyarakat pesisir untuk kemudian menjadi masyarakat yang mandiri, sedangkan dalam penelitian lain hanya melakukan analisis pola pengelolaan sumber daya pesisir berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut Peterson (2000, p.115) Komunikasi Pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf social dan ekonomi, yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Komunikasi pembangunan ini ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat, pemerintah dan negara, termasuk juga di dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah pada lembaga resmi siaran, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi.

Menurut sumarno dalam penilitiannya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan. Payne (Nasdian, 2014, p.89) menyatakan bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu proses yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Suatu pemberdayaan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Ife & Tesoriero (2008, p.662) menjelaskan bahwa “pemberdayaan bertujuan meningkatkan leberdayaan dari mereka yang dirugikan” (the disadvantaged).

Menurut Yudistira (2003) teori modernisasi adalah suatu deskripsi dan eksplanasi tentang proses transformasi dari masyarakat yang tradisional atau berkembang menuju masyarakat modern. Menurut Edward F. Borgotta dan Maria

Borgotta ciri masyarakat modern ditandai dengan kecenderungan mereka menganggap teori modernisasi sebagai salah satu perspektif sosiologi yang berorientasi pada pembangunan dan keterbelakangan (*development and underdevelopment*) (Yudistira 2003). Perhatian utama teori ini, yaitu pada cara masyarakat dulu dan sekarang yang telah modern diwesternisasikan melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, politik, dan struktur budaya.

Menurut Carl Iven Hovland teori *Stimulus Organism Response* menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non-verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (*source*) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.

Menurut Eroglu, Machleit, dan Davis dalam penelitian Hyojung Chang (2011) mengatakan model S-O-R klasik, stimulus didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan internal individu dan dapat dikonseptualisasikan sebagai pengaruh yang merangsang individu. Sedangkan menurut Bagozzi dalam penelitian Hyojung Chang (2011) mengatakan ketika perilaku kelompok digambarkan sebagai sistem S-O-R, rangsangan itu akan keluar untuk orang tersebut dan terdiri antara gabungan variabel pemasaran dan *input* lingkungan lainnya. Dalam studi ini, stimuli adalah karakteristik lingkungan ritel (sekeliling, desain, dan faktor sosial) karena mereka mempengaruhi respon emosional kelompok itu. Organisme mengacu pada proses-proses dan struktur internal yang mengintervensi antara rangsangan eksternal kepada orang tersebut dan tindakan akhir, reaksi, atau tanggapan yang dikeluarkan. Proses dan struktur intervensi terdiri dari kegiatan persepsi, fisiologis, perasaan, dan pemikiran. Menurut Xiabing Zheng dalam penelitiannya Berdasarkan paradigma S-O-R dan teori motivasi, penelitian ini memberikan landasan teoritis untuk memahami faktor situasi yang mempengaruhi nilai motivasi konsumen dan akhirnya diinduksi dorongan untuk membeli secara impulsif.

Aprilia Theresia dalam penelitian Nurul Lailatul Rohmah (2017) mengatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam buku *Perempuan Pesisir*, Kusnadi mengatakan sedangkan perempuan pesisir yang melaksanakan hak dan kewajibannya baik kegiatan domestik maupun publik. Dan peran Perempuan Pesisir adalah perempuan dewasa maupun muda yang mengandalkan sumber daya kelautan. Mereka adalah istri nelayan atau anggota keluarga pesisir yang terlibat secara langsung atau tidak dengan tetap atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha dan kesibukan lainnya berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga nelayan. Alice Prieto-Carolino & Bernice Landoy Mamauag (2019) dalam penelitiannya mengatakan Internalisasi yang kuat dari norma-norma sosial, ada bentuk perlawanan yang halus terhadap norma stereotip ini, tetapi ini selanjutnya diperkuat oleh kemiskinan dan akibatnya membatasi kesempatan mereka untuk emansipasi ekonomi. Dari Meyer (seperti dikutip dalam Cruikshank, 2009, hlm. 134) dengan tepat mengatakannya, "usia tua wanita kemiskinan secara langsung terkait dengan pembagian kerja secara seksual dimana banyak dari mereka pekerjaan wanita tidak menghasilkan upah atau kredit untuk masa pensiun." Setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka merawat anggota keluarga, mereka sekarang menghadapi kerentanan mereka sendiri sebagai pencari nafkah dan bukan pensiunan.

Victor P.H. Nikijuluw (2013) dalam penelitiannya mengatakan, dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat pesisir di kota Pekalongan. Tujuan penelitian fenomenologikal adalah menjelaskan

pengalama-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain.

Sumber data pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh dari informasi yang diberikan langsung oleh narasumber yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan data sekunder ialah data yang dihasilkan dari hasil pengetahuan dan keterangan dari studi kepustakaan yang meliputi jurnal penelitian, dokumentasi dan catatan-catatan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non partisipan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi Yayasan Az-Zahra pekalongan. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang dapat dipercaya untuk menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat. Sebagai pendukung peneliti melakukan observasi terlebih dahulu kepada yayasan Az-Zahra yang kemudian membantu untuk melakukan wawancara tersebut kepada masyarakat pesisir di kota Pekalongan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sample dipilih berdasarkan penilaian peneliti yang dianggap pilihan tersebut adalah yang paling baik untuk dijadikan narasumber sebagai metode penentuan sampling. Kriteria dari narasumber yaitu tokoh yang menginisiasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di kota pekalongan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pemberdayaan tersebut. Melalui wawancara, peneliti bermaksud untuk menggali proses kegiatan secara taktis dan teknis serta peneliti ingin menggali tentang realitas apa yang dihasilkan oleh Yayasan Az-Zahra.

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada.

Selanjutnya Sugiyono menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2012:335)

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

2.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian ke lapangan, maka jumlahnya data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplay atau juga disebut penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1994) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif) (sugiyono : 341)

2.3 *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. (Sugiyono, 2012:345)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

William F. Ogburn mengartikan perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material atau immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Kingsley Davis juga berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi didalam struktur masyarakat. Salah satu contoh adalah timbulnya organisasi buruh didalam masyarakat kapitalis-individual, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan pengusaha, selanjutnya perubahan-perubahan terjadi pada organisasi ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Gllin, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi karena suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima oleh masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Mac Iver mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (ekuilibrium) hubungan sosial. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial.

Menurut Koenjaraningrat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat pesisir. Permasalahan terbesar pada masyarakat pesisir adalah perekonomian masyarakat tersebut yang kemudian menjadi suatu alasan pemberdayaan ini dapat dilakukan. Dimas Imaniar menjelaskan dalam penelitiannya kemiskinan terjadi oleh beberapa faktor yang mendasar yakni rendahnya produktivitas nelayan yang pendapatannya hanya bertumpu pada penghasilan ikan yang diperoleh, selain itu juga faktor musim yang dipercaya oleh nelayan atau pencari ikan sehingga pemerintah menurunkan program demi kemakmuran

hidup nelayan yang dibawah garis kemiskinan untuk meningkatkan pendapatannya dengan cara mengembangkan potensi dari masyarakat.

Masyarakat pesisir di Pekalongan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran hanya berputar pada konsumsi yang dibutuhkan manusia pada umumnya, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan lain seperti sekolah untuk anak-anak mereka. Kemiskinan yang selalu menjadi "*trade mark*" untuk penduduk pesisir. Kristiyanti (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan tersebut tercermin dalam beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, bahaya laten terhadap perubahan sosial politik dan ekonomi yang melanda, serta ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal atau penguasa yang berasal dari luar lingkungan mereka. Kemiskinan tersebut disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh pengaruh faktor eksternal diluar individu. Faktor tersebut dapat berupa struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Semakin baik faktor tersebut didalam masyarakat maka kemiskinan menjadi semakin rendah tetapi jika faktor tersebut semakin rendah maka kemiskinan akan semakin tinggi. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka. Studi tersebut menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah dan masyarakat dapat mendukung gerakan menuju cara-cara yang lebih efektif dalam menangani konflik dan meningkatkan pengelolaan perikanan. Khondker Murshed-e-Jahan (2014) dalam penelitiannya mengatakan perwakilan dan partisipasi pengguna dalam proses resolusi konflik dan keterlibatan nelayan dalam pelaksanaan keputusan tersebut faktor penting dalam melegitimasi sistem manajemen.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal,

kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (indigenous) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Beberapa fakta diatas telah melatar belakangi pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Az-Zahra sehingga perekonomian mereka terbantu karena pemberdayaan ini, dan membantu meningkatkan status sosial mereka yang pada awalnya direndahkan oleh sebagian masyarakat di kota Pekalongan itu sendiri. Melihat perjalanan dari Yayasan Az-Zahra sendiri tidaklah mudah, pada awal pembentukan yayasan ini menemui pro dan kontra lantaran lembaga yang mereka bawa. Untuk masuk dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas masih memegang teguh islam kejawen, mereka akan menemui kesulitan jika yang mereka membawa nama muhammadiyah dalam melakukan pemberdayaan. Dalam pemikiran masyarakat awam seperti masyarakat pesisir ini, sangat sulit untuk kemudian menerima ajaran yang mereka belum pernah

mengerti sebelumnya. Alasan lain adalah tujuan dari Organisasi Otonom (ORTOM) Muhammadiyah yaitu Aisyiyah sendiri adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang merupakan komponen Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri bagi peningkatan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Alasan tersebut kemudian dijadikan landasan oleh mereka untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir tersebut.

Pendekatan yang dibangun oleh Yayasan tersebut bersifat kekeluargaan, sehingga ibu-ibu dan anak-anak yang diberdayakan merasa memiliki keluarga dari kalangan orang lain, dengan melakukan pelatihan kewirausahaan kepada ibu-ibu masyarakat pesisir disana sehingga dapat membantu dalam sector ekonomi dan juga membangun kemandirian yang nantinya akan membantu kehidupan dari masyarakat pesisir disana. Oleh karena itu, masyarakat tersebut sangat kental sekali kedekatannya dengan Yayasan tersebut dan juga mendapatkan kenyamanan dalam berinteraksi. Pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup dua dimensi yaitu budaya dan struktur sosial (Satria 2001). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dengan melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu, tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Dalam konteks budaya Yayasan ini mengambil budaya pekalongan yang terkenal hingga seluruh Indonesia yaitu Kota Batik, namun dalam pemberdayaannya, yayasan ini tidak menggunakan media batik sebagai pelatihan kewirausahaan masyarakat disana, melainkan dengan metode mendaur ulang barang bekas sehingga menjadi satu kerajinan yang dapat bersaing dengan kerajinan lain. Kerajinan tersebut berupa sulam bunga, vas bunga, dan tas, yang semua bahan-bahan nya adalah barang bekas yang di daur ulang. Wilayah pesisir sebagai zona peralihan antara lingkungan darat dan laut, wilayah pesisir dipengaruhi oleh perubahan dan tekanan dari darat maupun laut. Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dapat tercapai dengan menggunakan pendekatan dan penelitian terpadu dengan ekosistem, dengan melibatkan masyarakat umum maupun khusus dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi dari masyarakat setempat. Adapun tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh

Yayasan Az-Zahra sendiri antara lain: (1) mengatasi permasalahan yang muncul di pesisir dan lautan baik sedang berlangsung saat ini atau yang mungkin muncul dimasa mendatang; (2) memberdayakan masyarakat pesisir (para pengguna wilayah pesisir dan lautan atau biasa disebut stakeholder) agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan.

Dalam hal ini pemerintah kota pekalongan hanya membantu berupa materi sehingga Yayasan ini bukan merupakan kelembagaan dibawah pemerintah pekalongan. Regulasi yang cukup rumit membuat Yayasan ini tidak kemudian mengambil bagian dalam pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat pesisir, sehingga mereka mengandalkan orang-orang yang dirasa mampu untuk melakukan pemberdayaan ini. Namun seiring berjalannya waktu Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang kemudian membuat mereka harus berfikir keras dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut, pasalnya hal-hal yang mereka ajarkan kepada masyarakat masih belum membuka pikiran mereka untuk menciptakan kerajinan yang mungkin dapat menambah penghasilan mereka sehingga tidak bergantung kepada Yayasan terus menerus.

Dalam penelitian Sulsalman Moita mengatakan bahwa perkembangan Iptek dalam spektrum perubahan sosial merupakan realitas yang tak terelakkan, karena proses adaptasi manusia yang relatif mudah untuk diterima juga memberi dampak positif bagi kehidupannya. Berbeda dengan masyarakat pesisir di pekalongan sangat lambat dalam memahami dampak positif dari perkembangan Iptek yang sangat cepat, mereka takut untuk mempublikasi hasil karya yang mereka ciptakan kepada masyarakat luar, sehingga membuat Yayasan tersebut harus menambahkan kepercayaan diri dari masyarakat tersebut untuk mampu bersaing dengan masyarakat lain dalam hal kerajinan.

Dalam penelitian Togiartua Nainggolan mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan sosial, disamping beberapa sebab yang dikemukakan dalam pendekatan kognitif, beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hingga individu mengalami kecemasan sosial. Menurut Smith (1993) kecemasan sosial merupakan suatu tanda kecemasan dalam bergaul dengan orang lain atau kelompok lain. Individu dengan tingkat kecemasan sosial yang tinggi akan menunjukkan munculnya reaksi-reaksi seperti penarikan diri serta ketegangan

dalam menghadapi situasi sosial. Penarikan diri meliputi sensitifitas, merasa ditolak, tidak bahagia dan kurang percaya diri. Ketegangan dalam situasi sosial meliputi reaksi-reaksi fisik dalam situasi sosial dan kecemasan berada dalam situasi sosial. Rapee (1998) juga menjelaskan beberapa faktor tersebut seperti, (a) *thinking style* (cara berpikir) ; (b) *focusing attention* (fokus perhatian) ; dan (c) *avoidance* (penghindaran). Pada titik ini masyarakat pesisir pekalongan ini mengalami kecemasan, Togiartua juga menjelaskan jika golongan ini biasanya merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak dihargai. Merasa rendah diri, merasa bersalah, dan membenci dirinya sendiri.

Pemaparan penelitian diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat pesisir Pekalongan merasa rendah diri dengan apa yang telah mereka kerjakan dan merasa cemas untuk memperlihatkan hasil karyanya kepada masyarakat luas, sehingga membuat Yayasan harus meyakinkan masyarakat pesisir bahwa hasil kaya itu tetap akan dihargai walaupun hasilnya tidak memuaskan sama sekali.

Pada awalnya memang Yayasan ini dapat dikatakan berhasil lantaran Komunikasi Sosial Pembangunan yang mereka terapkan dalam membangun kesadaran masyarakat pesisir membuahkan hasil yang maksimal, karena masyarakat tersebut mulai mengerti akan pekerjaan yang dapat menghasilkan karya dan dapat diperlihatkan oleh kalangan masyarakat-masyarakat sekitar. Selain bentuk pelatihan kewirausahaan, Yayasan tersebut juga melakukan penanaman nilai-nilai agama yang jarang sekali mereka dapat sehingga membuat masyarakat dapat mengerti cara bersyukur kepada Allah SWT dan juga memahami pekerjaan yang baik dan buruk, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang di kerjakan Yayasan Az-Zahra selama kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun ini setiap 3 kali seminggu antara lain pada hari senin, rabu, jumat pukul 15.30 sampai maghrib. Untuk hari senin dan rabu Yayasan tersebut memberikan pelatihan kewirausahaan sedangkan setiap hari jumat memberikan pengajian rutin dengan menyisipkan nilai-nilai Muhammadiyah sebagai bentuk perkaderan dalam masyarakat. “Harapannya untuk kedepan bisa mewadahi apa yang memang kurang dalam kampung kami ini, dan bisa membantu untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.” Pemaparan dari ibu Darkonah salah satu warga kampung yang di berdayakan.

Peran dari Yayasan tersebut tidak hanya berupa pelatihan atau *community development* dan juga penanaman nilai-nilai agama, namun juga dalam menunjang

pendidikan formal bagi anak-anak pesisir juga mereka lakukan guna meningkatkan mutu pendidikan, dengan membayarkan dana sekolah mereka sehingga mereka dapat belajar secara formal hingga lulus sekolah dan dapat bekerja dengan layak. Rasa kekeluargaan yang kental membuat Yayasan ini mendapatkan tempat untuk melakukan kegiatan sosial tanpa dipandang buruk dari masyarakat disana. "Dengan adanya program pemberdayaan ini diharapkan masyarakat pesisir Pekalongan ini terbuka wawasan untuk berwirausaha sehingga tidak kembali pada pekerjaan yang tidak baik lagi." Pemaparan dari Ibu Eka salah satu anggota Yayasan Az-Zahra.

Dalam melakukan pemberdayaan, Yayasan tersebut masih menemui permasalahan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan masyarakat pesisir di kota Semarang dalam penelitian Iin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana yang memiliki system kelembagaan berupa Koperasi yang bertujuan untuk membantu permodalan nelayan walaupun masih bisa dikatakan belum berhasil, namun dalam memajukan ekonomi masyarakatnya sudah bisa dibilang maju. Hasil penelitian Sonbait & Wambrauw (2011) telah mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat akan menemui berbagai masalah-masalah antara lain adalah masalah ekonomi, rasa guyub rukun dan juga kebijakan pemerintah yang berlaku di sekitar masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi yang akan melakukan pemberdayaan juga menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi atau yayasan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat di suatu tempat dengan masalah yang melekat ditubuh mereka. Purbantara (2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu melalui beberapa tahapan dengan sistematis dan efisien. Tahapan tersebut antara lain adalah tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap implementasi kegiatan, tahap evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap terminasi.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (power within), 'kekuasaan untuk' (power to), 'kekuasaan atas' (power over) dan 'kekuasaan dengan' (power with). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:

- 3.1 Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 3.2 Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3.3 Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- 3.4 Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- 3.5 Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 3.6 Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

3.7 Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya (Edi Suharto, 2005).

Teori S-O-R adalah teori komunikasi sebagai penjelasan dari stimulus-organism- respon. Menurut teori tersebut, media masa memiliki peran penting dalam memengaruhi penerima pesan (masyarakat), teori S-R tersebut telah menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media dan masyarakat atau khalayak penerima pesan. Namun respon sesungguhnya juga dimodifikasi oleh organisme (O) dimana penerima menanggapi dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori S-O-R. Teori S-O-R sering digunakan karena jiwa manusia meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, efeksi dan konasi. Menurut teori stimulus respon ini dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek "*How*" bukan "*What*" dan "*Why*" perubahan sikap bergantung pada proses yang terjadi pada individu. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan teori S-O-R maka Yayasan Az-Zahra menggunakan model kepemimpinan dan juga gaya bicara mereka sehingga mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat pesisir untuk kemudian mampu mengubah dari hal yang negatif menuju hal yang positif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat juga sangat besar dalam kurun waktu 10 tahun ini.

4. PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan didukung oleh berbagai teori yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi sosial pembangunan yang digunakan oleh yayasan Az-Zahra untuk menciptakan kesejahteraan dan menunjang kegiatan positif yang dilakukan oleh perempuan pesisir dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan dengan pendekatan komunikasi interpersonal sehingga tercipta hubungan yang berkesinambungan antara yang melakukan pemberdayaan dan yang diberdayakan. Kemudian Yayasan tersebut juga menjadikan perempuan pesisir tersebut lebih mandiri dan juga lebih kreatif untuk menunjang kehidupan.

Jajat Sudrajat (2016) dalam penelitiannya mengatakan Fakta dalam lapangan menunjukkan bahwa strategi kelembagaan dan peran perempuan merupakan faktor

penting mendukung mata pencaharian rumah tangga nelayan. Ada dua institusi yang sering digunakan dalam komunitas nelayan, adat arisan dan hubungan patron klien nelayan dan pedagang desa. Melalui pemanfaatan modal sosial pada kedua institusi tersebut dapat diakses oleh rumah tangga nelayan modal finansial secara efektif. Karena itu, Pemeliharaan modal sosial harus diperhatikan dalam pengaturan strategi penghidupan yang berkelanjutan pada komunitas nelayan.

Beberapa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Yayasan Az-Zahra sangat berpengaruh terutama dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir di kota Pekalongan, dan terutama dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat terasa sekali dampaknya bagi masyarakat sekarang dan juga kedepannya diharapkan dapat menunjang kegiatan dari masyarakat untuk hidup mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dilla, Sumadi. 2007. *"Komunikasi Pembangunan"*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Fahrudin, Adi. 2012. *"Pengantar Kesejahteraan Sosial"*. Bandung : PT Refika Aditama
- Chang, Hyojung, 2011, *"Application of the Stimulus-Organism-Response Model To The Retail Environment: The Role of Hedonic Motivation in Impulse buying Behaviour"*, *The International Review of Retail, Distribution and Consumers Research* Vol. 21 No. 3 233-249 (2011)
- Iin Indarti, Dwiyadi Surya Wardana, 2013, *"Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang"*, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 17 Nomor 1 75-88 (2013)
- Ivan Rizali, 2004, *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut"*, *Jurnal Komunitas*, 61-68 (2004)
- Khondker Murshed-e-Jahan, Ben Belton, K. Kuperan Viswanathan, 2014, *"Communication Strategies for Managing Coastal Fisheries Conflicts in Bangladesh"*, *Ocean & Coastal Management* Vol. 92 65-73 (2014)
- Lailatur Rohmah, Nurul, 2017, *"Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Pengelolaan Ikan Laut Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Desa Purworejo, Bonang, Demak, Jawa Tengah)"*, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri
- Moita, Susalman, 2017, *"Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Tolaki Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara"*, Kendari : Universitas Halu Oleo (*Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 2 nomor 1) Juli 2017 hal: 16-22

- P.H. Nikijuluw, Victor, 2013, "*Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*", Direktut Pemberdayaan Masyarakat : Departemen Kelautan dan Perikanan
- Prieto-Carolino, Alice & Landoy Mamauag, Bernice, 2019, "*Pagdipara : Caring Work By Poor Elderly Women In Coastal Communities In Iloilo, Philipines*", *Asian Journal Of Woman's Studies* Vol 25, No 3 375-395 (2019)
- Sudrajat, Jajat, 2016, "*Livelihood Strategy Of Coastal Community: A Case Study in Tanjung Saleh Island, Kubu Raya District, Indonesia*", *Komunitas* Vol 8 No 1 22-31 (2016)
- Togiaratua Nainggolan, 2011, "*Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna Napza : Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*", *Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2011
- Wildan Saugi, Sumarno, 2015, "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal*", Papua Barat : SMPIT As-Salaam Fakfak (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 nomor 2) November 2015 hal: 226-238
- Zheng, Xiabing, 2019, "*Understanding impulse buying in mobile commerce: An investigation into hedonic and utilitarian browsing*", *International Journal of Information Management* Vol. 48 151-160 (2019)